



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : B/019.5/3144/Bag.Pem-2/XI/2022

Nomor : 53/ORI-MOU/XI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-11-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M. ZAIRULLAH AZHAR** : Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan di Batulicin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan nota kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
- d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;
- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik; dan

g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan dalam rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Alamat : Jalan Dharma Praja Nomor 01 Kel. Gunung
Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Telepon : WA-08115011674 / 081349539991

Email : bag.organisasi.tanbu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57
Banjarماسin

Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375

Website : www.ombudsman.go.id

Email : kalsel@ombudsman.go.id

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini

akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, dan yang secara langsung dan material menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalaminya atau **PIHAK** ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya segera setelah keadaan kahar berakhir.
- (6) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini dan/atau mengakhiri/membatalkan Nota Kesepakatan ini.
- (7) Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat keadaan kahar, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH



PIHAK KESATU,

H. M. ZAKRULLAH AZHAR

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU DAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : B/019.5/3144/Bag.Pem/XI/2022

NOMOR :/ORI-MOU/XI/2022

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

RENCANA KERJA

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

I. PIHAK KESATU

- a. Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja mengikuti penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten /nasional/internasional.

II. PIHAK KEDUA

- a. Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : B/019.5/3144/Bag.Pem/XI/2022

NOMOR : 53/ORI-MOU/XI/2022

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

RENCANA KERJA

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Output	Tahun			Tugas dan Tanggung Jawab	
				2022	2023	2024	Pihak KESATU	Pihak KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	□	√	√	Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Output	Tahun			Tugas dan Tanggung Jawab	
				2022	2023	2024	Pihak KESATU	Pihak KEDUA
2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	□	√	√	Mengikuti penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	□	√	√	Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

DINAS PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program/ kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Pencegahan Maladministrasi dalam Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	☐	√	√	Menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga pengawas dalam kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

2.	Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	□	√	√	Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	--	---	--	---	---	---	---	---

BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	□	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

BADAN PERENCANAAN PERMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	√	√	Mengikuti dan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	---	--

KECAMATAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Terselenggaranya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan	☐	√	√	Mengikuti Penyelenggaraan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Unit Kerja/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Bagian/UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

2.	Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah inovasi pelayanan publik	☐	✓	✓	Mengikuti Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
----	---	---	---------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIB

PIHAK KESATU,



H. M. ZAIRULLAH AZHAR